

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan sektor publik di Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi dan Pembangunan nasional. Sektor public mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pelayanan umum, investasi infrastruktur, dan pengeluaran sosial. Pertumbuhan sektor public di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan tantangan internal seperti ketimpangan regional dan kemiskinan. Pertumbuhan sektor publik di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik adalah praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan public lainnya. Pertumbuhan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya Era Reformasi pada awal tahun 2000-an, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan secara periodik salah satunya pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan negara mencakup perencanaan, penggunaan, dan pengawasan atas dana negara. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yang bersifat nasional. beberapa undang-undang penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara diantaranya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara dan penyusunan anggaran memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Penyusunan anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan negara, dan keduanya memiliki tujuan untuk menjamin penggunaan sumber daya negara yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi; 2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus; 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang); 4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas; 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil (BPKP, 2005).

Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan yang mencakup pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun. Dalam organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang biaya atas rencana yang telah disusun oleh organisasi/satuan kerja dan bagaimana cara memperoleh anggaran untuk mendanai kegiatan yang sudah disusun. Penyusunan anggaran merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban dalam proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan (Manik et al., 2022).

Penyusunan anggaran dimulai dengan pengidentifikasian tujuan, sasaran, dan strategi. Konsensus di antara semua pihak atau divisi tentang tujuan yang hendak dicapai merupakan faktor kunci dalam merencanakan anggaran. Proses penyusunan anggaran yang berlangsung lama dan melibatkan tahapan yang melelahkan, seringkali mengakibatkan masalah seperti ketidakakuratan dan kekurangan wawasan tentang cara menyusun anggaran yang efektif. (Manik et al., 2022).

Lemdiklat Polri selain bertugas dalam menyusun anggaran di satuan kerjanya, juga memiliki peran sebagai pengemban program profesionalisme SDM Polri yang bertugas dalam menyusun seluruh anggaran Pendidikan Polri yang ada di Indonesia, dimulai dari Pendidikan pembentukan, Pendidikan kejuruan, Pendidikan pengembangan, sampai dengan Pendidikan tinggi. Fenomena yang terjadi di Lemdiklat Polri, dalam tahun

anggaran berjalan, Lemdiklat Polri sering terjadinya revisi. Pada tahun 2022 Lemdiklat Polri merevisi anggaran sebanyak 6 kali, diantaranya disebabkan oleh: 1) Perubahan Kuota Pendidikan; 2) Perubahan Nomenklatur anggaran; 3) Penambahan Kegiatan Program Prioritas; 4) Penambahan kegiatan; 5) Perubahan anggaran makan siswa di SPN, Pusdik dan Sekolah; dan 6) Pengurangan anggaran, akibat dari *Automatic Adjustment* dari Kementerian Keuangan. Lalu pada tahun 2023 Lemdiklat Polri merevisi anggaran sebanyak 5 kali, diantaranya disebabkan oleh: 1) Perubahan Kuota Pendidikan; 2) Perubahan Nomenklatur anggaran; 3) Penambahan kegiatan; 4) Perubahan anggaran makan siswa di SPN, Pusdik dan Sekolah; dan 5) Pengurangan anggaran, akibat dari *Automatic Adjustment* dari Kementerian Keuangan.

Penggunaan waktu dan persiapan yang diperlukan untuk merevisi anggaran di Lemdiklat Polri lebih lama dibandingkan dengan unit kerja lainnya dalam lingkup Polri. Ini disebabkan oleh kebutuhan untuk tidak hanya merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lemdiklat Polri, tetapi juga harus melakukan revisi pada DIPA yang terdapat di Sekolah Polisi Negara, Pusat Pendidikan, dan Sekolah. Bagian Penyusunan Anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran memegang peran yang sangat penting sebagai layanan publik yang menekankan pada aspek anggaran. Pengelolaan anggaran yang efektif akan memberikan dukungan yang kuat bagi biro/bag dalam satuan kerja agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas mereka dengan baik, karena kebutuhan anggaran sudah terpenuhi dan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli.

Menurut Suyanto (2012) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu faktor sistem dan faktor orang. Sistem yang dimaksud menyangkut pada aturan-aturan dalam organisasi atau satuan kerja, sedangkan faktor orang menyangkut pada sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2023) pada judul Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah di Kabupaten Buleleng memiliki hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran.

Sementara itu, Komitmen tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran.

Hasil penelitian Wahyuni et al. (2023) didukung oleh Brahmana et al. (2022) yang meneliti mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo). Dari analisis Regresi Berganda memiliki hasil bahwa Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Penyempurnaan Sistem Administrasi berpengaruh positif terhadap Penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Syamsudin (2022) mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, dan Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Pohuwati. Dari analisis Regresi Berganda memiliki hasil Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendidikan. Dari hasil diatas dapat disimpulkan, apabila kualitas Sumber Daya Manusia semakin ditingkatkan akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran yang semakin baik.

Lubis dan Shara (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Medan. Dari analisis Regresi Berganda diperoleh hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Medan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ismid dkk. (2020) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Dari hasil Regresi berganda Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Reward dan Punishment berpengaruh positif terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja. Dari hasil diatas dapat disimpulkan, apabila kualitas teknologi informasi dalam proses penyusunan anggaran tercukupi dan mendukung akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran yang semakin baik.

Anggeadi et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha memiliki hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran DIPA. Hasil penelitian oleh Pujiono et al. (2016) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah memiliki hasil sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Selanjutnya penelitian Reni (2013) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating memiliki hasil sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian Surachmad (2002) mengenai dampak informasi eksternal terhadap kinerja bisnis telah memberikan hasil yang positif. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Provera (2003) mengenai dampak informasi eksternal terhadap kinerja usaha di Sumatera Barat menunjukkan bahwa informasi eksternal memiliki dampak positif terhadap kinerja usaha. Penelitian Yendrawati (2013) mengenai dampak modal internal dan modal manusia terhadap kualitas informasi keuangan menunjukkan bahwa faktor eksternal memoderasi dampak modal internal dan modal manusia terhadap kualitas informasi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa penelitian yang menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel Independen namun dikaitkan dengan Penyerapan Anggaran, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Sedangkan, yang menggunakan sebagai variabel Independen dalam Penelitian Penyusunan Anggaran belum ada. Sistem Pengendalian Internal dalam Proses Penyusunan Anggaran sangatlah penting karena Menurut Arfianti (2011) Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian peng-gelapan (fraud). Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan banyak ditemukan kasus penggelapan akan aset

daerah, dan itu akan merugikan negara secara keseluruhan. Semakin kuat Sistem Pengendalian Internal dalam suatu Lembaga/instansi akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran suatu instansi. Akan tetapi sebaliknya, apabila Sistem Pengendalian Internal dalam suatu Lembaga/instansi lemah akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadi penyimpangan anggaran.

Variabel yang akan dimoderasi dalam penelitian ini hanya variabel Sistem Pengendalian Internal. Dimana dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yendrawati (2013) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating memiliki hasil bahwa faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian yang menggunakan faktor eksternal yaitu inflasi, Informasi Teknologi, Kebijakan dan Force Majeure sebagai variabel moderasi dalam penelitian Penyusunan anggaran. Inflasi dapat mempengaruhi besaran anggaran dalam proses penyusunan anggaran karena keadaan ekonomi Negara yang sedang menaik naik atau menurun tentunya berpengaruh terhadap penawaran produk atau jasa yang diciptakan perusahaan. Kondisi ekonomi tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi bulanan atau tahunan secara umum atau secara khusus yang dilihat dari klasifikasi produk dan jasa. Peran teknologi dalam penyusunan anggaran Seperti layanan aplikasi dapat memudahkan karyawan dalam proses penyusunan anggaran, untuk meminimalisir kesalahan. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang semakin tinggi, harus diselaraskan dengan kemampuan SDM dalam mengelola aplikasi. Sehingga perkembangan teknologi tidak menjadi boomerang bagi Lembaga/instansi. Kebijakan dalam proses penyusunan anggaran sangatlah penting, apabila terdapat perubahan kebijakan oleh pimpinan dalam tahun anggaran berjalan. Maka akan terjadi penyesuaian pada anggaran disuatu Lembaga/instansi terkait. Dalam penyusunan anggaran Force Majeure memiliki peranan penting, contohnya saat terjadi covid-19 di Indonesia. Polri harus menyesuaikan Kembali anggarannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

masker, hand sanitizer, vitamin, dan swab yang sebelumnya tidak dialokasikan Adanya faktor eksternal sebagai variabel moderasi pada penelitian dapat menguatkan atau sebaliknya melemahkan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan Anggaran.

Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan anggaran dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderasi (studi kasus Lemdiklat Polri dan Jajaran)”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan Anggaran. Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu faktor eksternal hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan Anggaran.

Dalam peneltian Yendrawati (2013) menggunakan Faktor Eksternal sebagai variabel moderasi, namun variabel dependennya yaitu Informasi Laporan Keuangan, sedangkan yang menggunakan variabel dependen Penyusunan Anggaran belum ada. Selanjutnya terdapat beberapa penelitian diantaranya Angeadi et al. (2023), Pujiono et al. (2016) dan Reni (2013) yang menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel Independen namun dikaitkan dengan penyerapan anggaran, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Sedangkan, yang menggunakan sebagai variabel Independen dalam Penelitian Penyusunan Anggaran belum ada.

Berdasarkan uraian diatas, kesenjangan literatur dalam penelitian ini yakni penelitian yang masih minim dilakukan (*under researched/less studied*). Menurut (Purwohedi, 2022) *Under Researched* adalah penelitian yang mengangkat masih minimnya penelitian terdahulu dalam membahas suatu topik penelitian tertentu, sehingga atas dasar itulah peneliti akan mengangkat topik tersebut dan meneliti lebu dalam.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, oleh sebab itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sumber Daya Manusia mempengaruhi Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran?
2. Apakah Teknologi Informasi mempengaruhi Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran?
4. Apakah Faktor Eksternal memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah ruang lingkup yang harus dilakukan, berdasarkan masalah yang sedang diteliti tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mendiskusikan hasil yang ada berkaitan dengan literatur saat ini dan memperoleh implikasi akademik dan kebijakan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran.
4. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Eksternal memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyusunan anggaran di Lemdiklat Polri dan Jajaran.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoritis, diantaranya sebagai berikut:



### **1.5.1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan mampu mendukung *stewardship theory* dimana pemerintah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam hal ini masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai steward. Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini adalah pemerintah yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat harus bisa menyusun anggaran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya tanpa melibatkan kepentingan individu maupun politik. Semakin baik penyusunan anggaran dalam instansi akan berpengaruh pada NKA (Nilai Kinerja Anggaran). Dimana penilaian ini akan menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Keuangan dalam memberikan anggaran ditahun selanjutnya. Baik atau buruknya NKA dalam Satker, salah-satunya dipengaruhi oleh Penyusunan Anggaran.

### **1.5.2. Manfaat Praktis:**

Bagi Pembuat kebijakan terkait manajemen anggaran di lingkungan Lemdiklat Polri dan jajaran diharapkan dapat menyediakan dasar pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan kebijakan terkait manajemen anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan eksternal, Menyediakan dasar pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan kebijakan terkait manajemen anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan eksternal.

Bagi staf administrasi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran. Diharapkan dapat Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan anggaran, Memungkinkan staf administrasi untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan praktik-praktik penyusunan anggaran mereka.